

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Manajemen Pembiayaan Pendidikan

a. Pengertian Manajemen

Pengertian Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen adalah suatu ilmu juga seni untuk membuat orang lain mau dan bersedia bekerja untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan bersama oleh sebab itu manajemen memerlukan konsep dasar pengetahuan, kemampuan untuk menganalisis situasi, kondisi, sumber daya manusia yang ada dan memikirkan cara yang tepat untuk melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan.¹

Pada hakekatnya kegiatan manusia pada umumnya adalah mengatur (*managing*) untuk mengatur disini diperlukan suatu seni, bagaimana orang lain memerlukan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian Manajemen adalah suatu rangkaian proses yg meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian dalam rangka memberdayakan seluruh sumber daya organisasi/ perusahaan, baik sumberdaya manusia (*human resource capital*), modal (*financial capital*), material (*land, natural resources or raw materials*), maupun teknologi secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi/ perusahaan.²

Sementara itu, manajemen merupakan startegi yang digunakan pemimpin dalam mengimplementasikan kemampuannya pada suatu organisasi. Manajemen dalam makna pengelolaan organisasi dipahami dalam arti menyeluruh yaitu, yang meliputi berbagai dimensi diantaranya; perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pemanfaatan sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. manajemen dengan

¹ Winda sari, "Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Pepustakaan" *Jurnal Imu Informasi Kepustakaan dan Kearsipan*, Volume 1 Nomor 1, edisi September 2012, 41

² Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen*, Erlangga, Jakarta, 2012, hal. 12

penyusunan perencanaan, mengerakkan kegiatan dan pencapaian hasil yang diinginkan melalui pelibatan dan pemanfaatan sumberdaya manusia yang ada dalam organisasi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manajemen adalah kemampuan atau kekuasaan untuk mengatur suatu usaha, dan bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan dari usaha tersebut.³

Dimensi manajemen dipertegas lagi sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen, yang oleh Terry (1978) diistilahkan dengan POAC, yang merupakan singkatan dari *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*.

- 1) *Planning* atau perencanaan adalah kegiatan yang menentukan sasaran yang hendak dicapai, dan memikirkan cara serta penentuan penggunaan sarana dalam pencapaian sarana tersebut. Alokasi sumberdaya yang amat terbatas, merupakan prinsip dan landasan dasar dalam merumuskan perencanaan dan pengorganisasian. Dalam menyusun perencanaan harus ditentukan terlebih dahulu apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya dan siapa yang akan melakukan kegiatan dalam suatu organisasi. Dalam suatu perencanaan tersebut harus dipertimbangkan dari segi-segi teknis, ekonomis, sosial dan pelayanan yang diberikan organisasi. Jadi, perencanaan sebagai penghubung status sekarang dengan sasaran yang ingin dicapai itu menjadi ukuran perbandingan bagi setiap pemimpin, dalam penentuan sejumlah aktivitas yang harus dilakukan anggota dalam organisasi. Dalam suatu perencanaan yang jelas akan memudahkan setiap anggota organisasi menjalankan kegiatannya, sehingga dapat memberikan kontribusi secara maksimal dan positif terhadap organisasi.
- 2) *Organizing* atau pengorganisasian merupakan pengurusan dan penataan semua sumberdaya yang tersedia dalam organisasi tersebut, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya material. Penataan sumberdaya organisasi didasarkan atas konsep yang tepat melalui masing-masing fungsi seperti persyaratan tugas, tata kerja, penanggung jawab, dan relasi antar fungsi.

³ Abbas, Syahrizal. *Manajemen Perguruan Tinggi: Beberapa Catatan*. Jakarta: Kencana. 2008. 14

Fungsi-fungsi ini membentuk suatu hubungan dalam sistem, di mana bagian yang satu menunjang bagian yang lain dan lini yang satu bergantung pada lini yang lain. Dengan demikian, pengorganisasian merupakan kegiatan menjalin hubungan antar semua aktivitas kerja, penggunaan tenaga kerja, dan pemanfaatan semua sumberdaya, melalui struktur formal dengan kewenangan masing-masing.

- 3) *Actuating* atau penggerakan merupakan kegiatan menggerakkan dan mengendalikan semua sumberdaya organisasi dalam usaha pencapaian sasaran. Dalam penggerakan (*actuating*) dilakukan penyatuan semua kegiatan dan penciptaan kerjasama dari seluruh lini, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan lancar dan efisien.
- 4) *Controlling* atau pengawasan, merupakan sesuatu yang perlu dilaksanakan agar para anggota organisasi dapat bekerjasama dengan baik, dan pergerakan yang sama ke arah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi. Pengawasan dilakukan untuk mengukur hasil pekerjaan, guna menghindari penyimpanganpenyimpangan, dan jika diperlukan segera melakukan tindakan yang tegas terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi.

b. Pengertian Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Manajemen pembiayaan terdiri dari dua kata yaitu manajemen dan pembiayaan. Menurut Shulhan dan Soim bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dari sebuah organisasi.⁴ Pendapat lain juga diungkapkan oleh Ducker bahwa manajemen adalah suatu ramalan bahwa dengan menggunakannya seorang manager pada waktu yang akan datang akan dapat mempertanggungjawabkan baik hasil maupun kualitas hubungan kemanusiaan yang berlaku di dalam organisasinya.⁵

Manajemen merupakan kegiatan yang dilakukan dari, oleh dan bagi manusia, bersifat kompleks dan unik yang

⁴ Shulhan dan Soim, “*Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Dasar Menuju Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*”, (Yogyakarta: Teras, 2013), 16

⁵ Davies, “*The Management of Learning*”. (London : McGraw-Hill Book Company, 2011), 321

berbeda dengan tujuan perusahaan yang mencari keuntungan yang sebesar-besarnya; tujuan kegiatan pendidikan lebih mengarah kepada penciptaan kecerdasan bangsa, proses pengelolannya dilakukan secara kelompok dengan mengarahkan pada tujuan organisasi ke arah yang lebih baik dan mengedepankan sumberdaya yang ada dalam sekolah.⁶

Manajemen keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkannya secara efektif dan transparan seluruh pembiayaan yang telah di gelontorkan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, manajemen keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.⁷ Oleh sebab itu perlu adanya tanggung jawab yang bersifat wajib mengenai pebiayaan pendidikan tersebut. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 5 bahwa harta sebagai salah satu titipan Allah SWt juga harus perlu dikelola dengan baik dan profesional berdasarkan pengetahuan:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (النساء: ٥)

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS. An-Nisa: 5)⁸

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan yaitu pengelolaan semua bentuk keuangan baik usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai aktifitas atau kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, baik yang

⁶ Arikunto, Suharsimi dan Lia Yuliana, "Manajemen Pendidikan", (Yogyakarta: Aditya Media, 2013), 14

⁷ Mulyasa, "Managemen Berbasis Sekolah", (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003), 194

⁸ Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 5, Al-Qur'an dan Terjemahannya

dikeluarkan oleh sekolah maupun siswa. Pembiayaan madrasah selain bersumber berasal 21 dari orang tua siswa juga bersumber dari pemerintah, bantuan luar negeri dan sumbangan sukarela.

c. Tujuan Manajemen Pembiayaan Pendidikan.

Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah/madrasah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah/madrasah secara efektif dan efisien. Untuk itu tujuan manajemen keuangan adalah:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah atau madrasah.
- 2) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah atau madrasah.
- 3) Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah atau madrasah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala madrasah dengan menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendahara yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Menurut Mohamad Mustari bahwa pihak sekolah atau madrasah mesti melakukan tugasnya untuk memastikan target-target manajemen keuangan sebagai berikut:⁹

- 1) Menjamin agar dana yang tersedia dipergunakan untuk kegiatan harian sekolah atau madrasah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali
- 2) Memelihara barang-barang (aset) sekolah
- 3) Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan.

Menurut pendapat Rohiat bahwa tujuan manajemen keuangan sekolah adalah untuk mewujudkan tertibnya administrasi keuangan sehingga penggunaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁰ Dari pengertian di atas bahwa tujuan manajemen

⁹ Mohamad Mustari, *"Manajemen Pendidikan"*, (Surabaya, Permata Pres: 2016), 167

¹⁰ Rohiat, *"Manajemen Sekolah"*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 27

pembiayaan pendidikan yaitu agar semua kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan yang ada di madrasah dapat dilaksanakan secara fiktif dan efisien.

2. Pembiayaan Pendidikan

a. Pengertian Pembiayaan Pendidikan

Ada banyak sekali pengertian tentang pembiayaan pendidikan, dari pada para tokoh tokoh yang sangat berperan aktif dalam dunia pendidikan. Salah satunya Menurut Supriadi dalam bukunya yang berjudul Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah, ia berpendapat bahwa Biaya (cost), merupakan salah satu komponen masukan (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.¹¹

Kemudian Menurut Harsono dalam bukunya yang berjudul Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan, Biaya dapat diartikan sebagai semua jenis pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.¹² Sedangkan menurut Hallak, dalam bukunya yang berjudul Analisis Biaya dan Pengeluaran Untuk Pendidikan. Biaya pendidikan dapat juga diartikan sebagai kegiatan pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan dengan uang).¹³

Dari pendapat beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sumber daya baik berupa uang, tenaga atau barang yang secara langsung dapat menunjang efektivitas dan penerapan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan, lebih terasa lagi dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Sehingga sumber pembiayaan pada pendidikan swasta membutuhkan adanya bantuan dari donator-donatur, wali murid dan lain sebagainya.

¹¹ Dedi Supriadi, “*Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*”, (Remaja Rosdakarya : Bandung, 2006), h. 34

¹² Harsono, “*Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*”, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), h. 78

¹³ Hallak, “*Analisis biaya pengeluaran untuk pendidikan*,” (Jakarta : Bhartara Karya Aksara, 2005), h. 102

b. Jenis Pembiayaan Pendidikan

Beberapa jenis dan golongan biaya pendidikan yang dikaji dalam artikel ini sebagai berikut:¹⁴

1) Biaya langsung (*direct cost*)

Biaya langsung dapat diartikan sebagai pengeluaran uang yang secara langsung membiayai penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Biaya langsung juga diartikan sebagai biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan. Sebagai contoh biaya untuk gaji guru dan pengadaan fasilitas belajar-mengajar. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, dan gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah, orang tua, maupun peserta didik sendiri. Berikut ini jenis-jenis biaya yang merupakan bagian dari biaya langsung (*direct cost*), yaitu: Biaya rutin (*recurrent cost*).

Biaya rutin (*recurrent cost*) merupakan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama satu tahun anggaran. Biaya ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran, pembayaran gaji guru, dan personil sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana. Fironika berpendapat bahwa biaya rutin dihitung berdasarkan “*per student enrolled*”. Menurutny, biaya rutin dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor utama, yaitu:¹⁵ 1) rata-rata gaji guru per tahun; 2) ratio guru, murid dan proporsi gaji guru terhadap keseluruhan biaya rutin; dan 3) biaya pembangunan (*capital cost*), merupakan biaya yang digunakan untuk pembelian tanah, pembangunan ruang kelas, perpustakaan, lapangan olah raga, konstruksi bangunan, pengadaan perlengkapan mobelair, biaya penggantian dan perbaikan.

Lebih lanjut, Fironika menyatakan bahwa biaya pembangunan dihitung atas dasar “*per student place*”.

¹⁴ Ferdi W, *Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis*, (Surabaya: Putra Mandiri, 2013), h. 570.

¹⁵ Fironika Rida, “*Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*”, (*Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Universitas Islam Sultan Agung*), h. 49

Menurutnya, dalam menghitung biaya pembangunan ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu pertama: tempat yang menyenangkan untuk murid belajar, biaya lokasi atau tapak (*site*), dan biaya perabot dan peralatan.

2) Biaya tidak langsung (*indirect cost*)

Biaya tidak langsung dapat diartikan sebagai biaya yang umumnya meliputi hilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikuti pendidikan (*earning foregone by students*), bebasnya beban pajak karena sifat sekolah yang tidak mencari laba (*cost of tax exemption*), bebasnya sewa perangkat sekolah yang tidak dipakai secara langsung dalam proses pendidikan serta penyusutan sebagai cermin pemakaian perangkat sekolah yang sudah lama dipergunakan (*implicit rent and depreciation*). Berikut ini jenis-jenis biaya yang merupakan bagian dari biaya tidak langsung (*indirect cost*).

Diantaranya yaitu : biaya pribadi (*private cost*), adalah pertama, biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dan termasuk di dalamnya *forgone opportunities*. Dalam kaitan ini, Jones mengatakan “*In the context of education these include tuitions, fees and other expenses paid for by individuals*”. Dengan kata lain, biaya pribadi adalah biaya sekolah yang dibayar oleh keluarga atau individu. Kedua, biaya masyarakat (*social cost*), adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah (di dalamnya termasuk biaya pribadi). Dalam kaitan ini, Thomas, H. Jones mengatakan “*Sometimes called public cost, the include cost of educations financed through taxation. Most public school expenses are examples of sosial costs*”. Dengan kata lain, biaya masyarakat adalah biaya sekolah yang dibayar oleh masyarakat.

3) *Monetary cost dan non monetary Cost*

Monetary cost adalah semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan dan *non monetary Cost* adalah semua bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang, meskipun dapat dinilai ke dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan,

misalnya materi, waktu, tenaga, dan lain-lain. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 62 disebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; bahan atau peralatan habis pakai; dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

c. Model Pembiayaan Pendidikan

Konsep model penentuan biaya sekolah/madrasah sesuai dengan standar komponen pendidikan nasional. kebutuhan total biaya satuan sekolah/madrasah dapat dihitung berdasarkan kebutuhan pembiayaan dengan mengacu pada standar komponen pendidikan nasional dengan menunjuk pada program dan tujuan yang ingin dicapai. Pengelompokan komponen biaya tersebut diambil sebagai komponen minimal yang dilaksanakan di sekolah/madrasah.¹⁶

Asumsi model penentuan biaya satuan untuk sekolah/madrasah yang mungkin dapat dialokasikan adalah sebagai berikut.¹⁷

- 1) Pengeluaran kebutuhan pokok per siswa per tahun.
- 2) Pengeluaran guru per tahun berdasarkan rasio guru-murid.
- 3) Pengeluaran untuk buku teks per siswa per tahun dengan rasio buku siswa.
- 4) Pengeluaran untuk bahan dan alat pelajaran habis pakai untuk praktikum per siswa per tahun.
- 5) Pengeluaran untuk pemeliharaan seluruh sarana akademik (gedung) per siswa per tahun.
- 6) Pengeluaran untuk manajemen sekolah, yaitu kepala sekolah.

¹⁶ Dadang Suhardan, *“Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan”*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 23

¹⁷ Ibid, h. 90

- 7) Pengeluaran untuk ujian sekolah untuk pembelian bahan, alat tulis sekolah, dan transport guru.
- 8) Pengeluaran untuk daya dan jasa.
- 9) Pengeluaran untuk penunjang per tahun.

3. Landasan Hukum Sumber Pembiayaan Pendidikan

Dalam melindungi pembiayaan pendidikan Pemerintah sudah menuliskan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi “Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas public”.¹⁸ Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah yang terdiri atas 5 (lima) jenis, yaitu:¹⁹

- a. Biaya investasi satuan pendidikan yang meliputi biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan.
- b. Biaya investasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan yang meliputi biaya investasi lahan biaya investasi selain lahan.
- c. Biaya operasi satuan pendidikan yang meliputi biaya personalia dan biaya nonpersonalia
- d. Biaya operasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan yang meliputi biaya personalia dan biaya nonpersonalia.
- e. Biaya pendidikan dan beapeserta didik.

Selain itu, MPR RI menetapkan amandemen pasal 31 yang menetapkan kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar yang wajib bagi setiap warga Negara (pasal 31 ayat (2)) dan kewajiban negara (pemerintah dan DPR) memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta dari APBD (pasal 31 ayat (4) UUD 1945), pada tanggal 26 Januari 2004 kepada kesepakatan untuk mengalokasikan anggaran pendidikan 3,49% APBN dan secara bertahap akan terus ditingkatkan sehingga pada tahun 2009 akan mencapai 20% APBN.²⁰

Akan tetapi, hal tersebut berbanding terbalik dengan kebijakan pemerintah pada sekolah swasta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 48 Tahun 2008 Tentang Keuangan

31. ¹⁸ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.

¹⁹ Ibid, h. 43

²⁰ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, “Pasal 31 ayat 1-5 Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan”.

Pendidikan menyebutkan bahwa pendidikan swasta dalam rangka pembiayaan pendidikan mendapat bagian terkecil dari pemerintah, karena pembiayaan atau pembiayaan satuan pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat, satuan pendidikan yang bersangkutan.²¹ Maka dari, dalam hal ini peneliti ingin lebih mengetahui sumber pembiayaan pada madrasah swasta.

4. Sumber-sumber pembiayaan Pendidikan

Dalam pengeluaran pembiayaan pendidikan, ada beberapa sumber sumber yang dapat di alokasi pada pembiayaan pendidikan, di antaranya tergolong atas biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat orang tua / wali siswa, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua / wali siswa, dan lembaga pendidikan itu sendiri. Untuk biaya pada tingkat sekolah, berasal dari:

a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pembiayaan pendidikan nasional disusun dengan mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah kita menegaskan mengenai pembiayaan pendidikan melalui Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan ini pemerintah sudah mempunyai per undang undangan dalam hal pembiayaan pendidikan nasional, bantuan tersebut berupa:

1) Dana BOS

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk kepentingan pendidikan yang bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin yaitu yang dalam membiayai pendidikan kurang memenuhi.²² Dana BOS merupakan program pemerintah berupa pemberian dana langsung ke lembaga pendidikan baik Negeri maupun Swasta dimana besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan

²¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2010), hlm. 229-230.

²² Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. (Jakarta, 2015) hal. 4

jumlah siswa masing-masing sekolah dan satuan biaya (unit cost) bantuan.

BOS memberikan dana untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasional sekolah. Sebagai wujud perhatian terhadap siswa miskin atas pengalokasian dana bantuan operasional tersebut, sekolah diwajibkan untuk membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) siswa miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa. Secara umum, Program BOS cenderung dilaksanakan sebagai subsidi umum.

Hal ini terjadi karena Program BOS memiliki cakupan yang luas dan merata, baik dilihat dari jumlah sekolah maupun jumlah siswa. Sekolah yang menolak Program BOS ini hanya sebagian kecil saja dan umumnya sekolah yang relatif kaya. Keputusan untuk menolak Program BOS tersebut dilakukan secara sepihak oleh pengelola sekolah, tanpa bermusyawarah dengan orangtua siswa

2) Dana BSM

Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap siswa miskin. Tujuan pemberian dana ini adalah untuk mencegah siswa miskin dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan di sekolah dan juga memberi peluang/kesempatan yang lebih besar kepada siswa miskin untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikannya. Sasaran pemberian bantuan dana BSM ini dikhususkan bagi siswa yang kurang mampu/miskin saja

b. Orang Tua/ Wali Siswa

Selain pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sekolah juga memperoleh pembiayaan pendidikan dari orang tua / wali siswa atau yang biasa disebut dengan pengeluaran keluarga atau bisa di sebut dengan infak dan SPP bulanan. Pengeluaran keluarga untuk pendidikan dasar dan menengah itu banyak sekali jenisnya.

Berikut ini ditunjukkan komponen-komponen biaya yang ditanggung oleh orang tua/wali siswa, meskipun tidak semua komponen berlaku untuk semua sekolah, namun data ini mampu memberikan gambaran tentang banyaknya

pengeluaran orang tua siswa, bahkan untuk hal-hal yang menurut aturan “tidak lagi dibenarkan” dipungut di sekolah. Jenis-jenis pengeluaran orang tua/wali siswa untuk pendidikan antara lain:

- 1) Uang Pangkal
- 2) Uang Sekolah Bulanan / SPP
- 3) Biaya Ulangan Tengah Semester
- 4) Biaya Ulangan Akhir Semester
- 5) Biaya Kegiatan Ekstrakurikuler
- 6) Biaya Kegiatan Praktikum
- 7) Pembelian Buku Pelajaran / LKS
- 8) Pembelian Pakaian Seragam Sekolah
- 9) Biaya Karyawisata / Bina Mental / Retret
- 10) Sumbangan Sosial (APP dan AAP)
- 11) Biaya-biaya lainnya.

Peran serta orang tua / wali siswa dalam pendidikan bertujuan untuk ikut serta memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan. Dengan demikian terjalinnya kerja sama yang baik antara orang tua murid/siswa dengan guru agar terlaksananya pendidikan sesuai yang di harapkan.²³

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Madrasah Swasta, sebagai berikut:

1. Lisnawati, 2019, Penelitian Skripsi yang berjudul Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Muftadiin Islam Kendal Ngawi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis sistem penganggaran dan bentuk pembukuan pembiayaan pendidikan di MI Muftadiin Islam Kendal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penganggaran di sekolah tersebut yaitu menentukan rencana anggaran, menentukan sumber dana, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS), serta pengesahan anggaran. Selain itu dalam pembukuan menggunakan dua jenis kegiatan yaitu penerimaan dana dan pengeluaran dana. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan

²³ Sri Lestari, “*Tinjauan Tentang Pembiayaan Pendidikan*” (Jakarta: ArdianPress, 2009). h. 10

bahwa penganggaran pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh MI Muftadiin Islam Kendal meliputi empat langkah yaitu menentukan rencana anggaran, menentukan sumber dana, menyusun rencana anggaran kedalam format RAPBM dan RKAM, dan proses pengesahan anggaran.²⁴

2. Ahmad Faizal Fahmi, 2020, Penelitian Skripsi yang berjudul Implementasi Manajemen Pembiayaan di Madrasah Aliyah (MA) Pembaharuan Karang Bahagia-Bekasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Manajemen Pembiayaan di Madrasah Aliyah (MA) Pembaharuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan sudah berjalan, akan tetapi belum tercapai secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan jawaban yang diperoleh dari 1 Tata Usaha dan 2 orang guru melalui pertanyaan yang diajukan. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Perencanaan pada Madrasah Aliyah Pembaharuan sudah berjalan sangat baik, mulai dari tahap kepala sekolah memberikan arahan sebelum melaksanakan tugas, menghargai pendapat bawahan yang dalam hal ini pendidik dan tenaga kependidikan, dan melibatkan pendidik dan tenaga kependidikan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.²⁵
3. Asep Rahman Sudrajat, 2019, Penelitian Jurnal yang berjudul Pembiayaan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Satu Atap (Penelitian di MTs SA Syifaurrehman Tasikmalaya). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persoalan pembiayaan pendidikan madrasah di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Syifaurrehman mulai dari perencanaan anggaran, pengadaan anggaran, pendistribusian anggaran, pembukuan anggaran dan pengawasan dan pertanggung jawaban anggaran serta bagaimana strategi kepala sekolah dalam mengelola sumber dana yang diperoleh guna tercapainya pendidikan yang diharapkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan di MTs SA Syifaurrehman Tasikmalaya melalui beberapa tahapan antara lain perencanaan pembiayaan dengan melakukan analisis kebutuhan madrasah selama satu tahun oleh komite yang dibentuk oleh kepala sekolah, kemudian pelaksanaan

²⁴ Lisnawati, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Muftadiin Islam Kendal Ngaw", (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019)

²⁵ Ahmad Faizal Fahmi, "Implementasi Manajemen Pembiayaan di Madrasah Aliyah (MA) Pembaharuan Karang Bahagia-Bekasi ", (Skripsi, Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

pembiayaan dilakukan dengan penggunaan biaya secara tepat sesuai dengan kebutuhan secara berkala, pengawasan pembiayaan dilakukan oleh pihak kemenag, evaluasi dilakukan dengan melaporkan rincian biaya yang dikeluarkan selama satu periode dengan melampirkan seluruh bukti transaksi.²⁶

Dari beberapa penelitian diatas, menunjukkan bahwa penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu masih membahas tentang manajemen pembiayaan sekolah. Dengan kata lain terdapat kesamaan dalam penelitian tersebut yaitu analisi manajemen pembiayaan pada sekolah swasta. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan ketiga penelitian diatas yaitu terletak pada masalah penelitian, objek, dan tempat penelitian. Pada penelitian pertama lebih memfokuskan pada rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Penelitian yang kedua lebih memfokuskan pada Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan sudah berjalan, akan tetapi belum tercapai secara maksimal. Adapun penelitian yang ketiga lebih memfokuskan pada pembiayaan pendidikan madrasah di Madrasah Tsanawiyah Satu Atap Syifaurrehman mulai dari perencanaan anggaran, pengadaan anggaran, pendistribusian anggaran, pembukuan anggaran dan pengawasan dan pertanggung jawaban anggaran serta bagaimana strategi kepala sekolah dalam mengelola sumber dana yang diperoleh guna tercapainya pendidikan yang diharapkan.

C. Kerangka Berfikir

Dalam kerangka berfikir berisi tentang teori-teori yang terkait dengan masalah penelitian dengan ringkasan deskriptif untuk memudahkan pembaca memahaminya dalam konteks pemikiran. Kerangka berfikir merupakan model yang mempunyai konsep tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.²⁷

Sumber pembiayaan pendidikan merupakan salah satu standar pendidikan yang di buat oleh pemerintah, sebagai prasyarat mencapai pendidikan yang bermutu. Dalam hal ini pembiayaan pendidikan memiliki komponen dalam kaitannya yaitu biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya rutin sekolah. Pembiayaan pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kajian manajemen

²⁶ Asep Rahman Sudrajat, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Satu Atap (Penelitian di MTs SA Syifaurrehman Tasikmalaya)", *Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 1, No. 2, (2019)

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 60.

pendidikan. Akan tetapi pembiayaan pendidikan mempunyai kajian tersendiri dalam kaitannya, dan mempunyai fungsi dalam prosesnya. Fungsi pembiayaan pendidikan yaitu bagaimana memperoleh biaya dan bagaimana mempergunakan biaya tersebut.²⁸

Kegiatan pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya biaya, begitu juga minimnya biaya yang terdapat dalam lembaga pendidikan dapat mempengaruhi ketercapaian tujuan yang telah ditentukan. Biaya merupakan sebuah ruh dalam setiap kegiatan yang ada. Tanpa ada biaya segala kegiatan yang telah direncanakan sebaik mungkin tidak akan dapat berjalan. Akan tetapi bukan dari seberapa besar biaya yang akan dipergunakan atau yang dikeluarkan melainkan biaya tersebut direncanakan untuk apa, dan bagaimana cara pelaksanaan penggunaan anggaran tersebut. Artinya segala hal yang akan dilakukan harus sesuai dengan segala literatur yang telah diencanakan sejak awal. Apabila mendapati segala yang terjadi dalam proses berjalannya maka harus segera di musyawarahkan dan secepatnya mencari alternatif jalan keluar yang baik.



²⁸ Ahmad Faizal Fahmi, “Implementasi Manajemen Pembiayaan di Madrasah Aliyah (MA) Pembaharuan Karang Bahagia-Bekasi “, (Skripsi, Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), h. 13

Gambar 2.1 : Kerangka Berfikir

